

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## BP3TKI BANDUNG TAHUN 2018



BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA BANDUNG  
Jalan Soekarno – Hatta No. 587 Telp. 022-7333212/Fax. 022-7336965 Bandung 40287  
e-mail : [bp3tkibandung@bnp2tki.go.id](mailto:bp3tkibandung@bnp2tki.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan menggunakan pedoman penyusunan LAKIP yang baru berdasarkan Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP ini dibuat guna memenuhi kewajiban setiap unit satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan selama satu tahun anggaran kepada atasan.

Isi dari laporan ini menguraikan seluruh aktivitas secara rinci dan sistematis dengan menggunakan metode LAKIP yang menggambarkan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi, Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan.

Mudah-mudahan Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung tahun 2018 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 1 tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

**Bandung, 23 Januari 2019**  
**Kepala,**

**DELTA, S.H., M.M.**  
**NIP. 19611224 198912 1 001**



## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	Iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Aspek Strategis	3
D. Permasalahan ( <i>Issue Strategis</i> )	3
E. Maksud dan Tujuan	4
F. Ruang Lingkup	4
G. Struktur Organisasi dan Pegawai	4
H. Dasar Pelaksanaan	6
I. Sistematika Penyajian	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis BP3TKI Bandung 2015-2019	10
B. Program dan Kegiatan	17
C. Penetapan Kinerja Tahun 2018	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengelolaan Kinerja	26
B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2018	31
C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018	33
D. Akuntabilitas Keuangan	44
E. Kendala	47
F. Tindak Lanjut	48
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

**DAFTAR TABEL**

	<b>HAL</b>
<b>Tabel 1.</b> Jumlah Pegawai BP3TKI Bandung Tahun 2018	6
<b>Tabel 2.</b> Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BP3TKI Bandung	11
<b>Tabel 3.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja BP3TKI Bandung	12
<b>Tabel 4.</b> Target Kinerja BP3TKI Bandung	13
<b>Tabel 5.</b> Arah Kebijakan dan Strategi BP3TKI Bandung Tahun 2015 - 2019	15
<b>Tabel 6.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Kelembagaan	17
<b>Tabel 7.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Penyiapan	18
<b>Tabel 8.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Perlindungan	18
<b>Tabel 9.</b> Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Bagian Tata Usaha	19
<b>Tabel 10.</b> Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	20
<b>Tabel 11.</b> Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018	22
<b>Tabel 12.</b> Reviu Target Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018	24
<b>Tabel 13.</b> Kategori Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018	26
<b>Tabel 14.</b> Pengukuran Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018 (Per Triwulan)	27
<b>Tabel 15.</b> Pengukuran Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018	29
<b>Tabel 16.</b> Hasil Evaluasi Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018	31
<b>Tabel 17.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesatu	33
<b>Tabel 18.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua	34
<b>Tabel 19.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketiga	35
<b>Tabel 20.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keempat	35
<b>Tabel 21.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kelima	36
<b>Tabel 22.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keenam	37
<b>Tabel 23.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketujuh	38
<b>Tabel 24.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedelapan	38
<b>Tabel 25.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesembilan	39
<b>Tabel 26.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesepuluh	41
<b>Tabel 27.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesebelas	42
<b>Tabel 28.</b> Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua belas	43
<b>Tabel 29.</b> Realisasi Keuangan BP3TKI Bandung Tahun 2018	45
<b>Tabel 30.</b> Realisasi Keuangan BP3TKI Bandung berdasarkan Belanja Tahun 2018	46
<b>Tabel 31.</b> Realisasi Keuangan BP3TKI Bandung Per Jenis Belanja Tahun 2018	46

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BP3TKI Bandung serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, semua pimpinan Instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja mulai eselon II ke atas secara berjenjang, maka disusunlah LAKIP BP3TKI Bandung Tahun 2018.

Menyikapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, BP3TKI Bandung ke depan menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat dan harus semakin cermat dalam menyusun perencanaan agar lebih fokus, dan dapat menjawab berbagai persoalan.

Berdasarkan Visi, Misi dan tujuan BP3TKI Bandung yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategi BP3TKI Bandung 2015–2019, terdapat 12 sasaran yang akan dicapai yaitu:

- 1) Tersedianya Peta Potensi CTKI;
- 2) Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI;
- 3) Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai;
- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural;
- 5) Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan;
- 7) Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna;
- 8) Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan;
- 9) Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro;
- 10) Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah;

- 11) Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan;
- 12) Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi.

Sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak dicapai dalam pelayanan penempatan TKI, dinilai dari Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja (Tapja) tahun 2018, yaitu:

- 1) Jumlah Potensi CTKI;
- 2) Persentase CTKI mendaftar pada Job info;
- 3) Persentase TKI yang ditempatkan memenuhi standar yang ditetapkan;
- 4) Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem;
- 5) Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai;
- 6) Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN;
- 7) Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan;
- 8) Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI;
- 9) Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI;
- 10) Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum;
- 11) Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen;
- 12) Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non procedural;
- 13) Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha;
- 14) Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan;
- 15) Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha;
- 16) Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI;
- 17) Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya;
- 18) Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal;

- 19) Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP;
- 20) Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat;
- 21) Jumlah Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM);
- 22) Persentase terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI.

Adapun Capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut :

### 1. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesatu Tersedianya Peta Potensi CTKI

**Tabel**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesatu**  
**Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah Potensi CTKI	5.400	5.261	<b>97,43</b>	5.400	5.943	<b>110,06</b>
Persentase CTKI mendaftar pada Job Info	30%	10%	<b>33,33</b>	30%	10%	<b>33,33</b>

#### • Jumlah Potensi CTKI

Jumlah target potensi CTKI dari Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Kab/Kota sebanyak seluruh peserta sosialisasi sebanyak 5.400 orang. Seharusnya target potensi CTKI tahun 2018 berjumlah 156.317 orang, namun terdapat revisi dengan jumlah target menjadi 5.400 orang. Dari laporan 27 Kab/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang diperoleh dari lembaga pendidikan (SMK Kejuruan, Akademi Kebidanan, Poltekkes), Lembaga Pelatihan dan Balai Latihan Kerja, peminat kerja ke Luar Negeri, pencaker yang datang ke BP3TKI Bandung serta Alumni Sekolah Keperawatan yang berminat bekerja sebagai perawat di Kuwait diperoleh data potensi CTKI Tahun 2018 sebanyak 5.943 orang CTKI atau 110,06%.

#### • Persentase CTKI mendaftar pada Job Info

Jumlah target persentase CTKI mendaftar pada Job Info sebesar 30%, namun realisasinya tidak tercapai dikarenakan CTKI tertarik hanya ke Negara Penempatan tertentu dan hanya tertarik pada job tertentu, sedangkan kedua alasan tersebut belum bisa difasilitasi oleh website BNP2TKI. Sehingga realisasi persentase CTKI mendaftar pada Job Info tahun 2018 sebesar 10%. Proses sign up Jobsinfo tidak bisa langsung terdaftar karena ada proses verifikasi oleh pusat. Pencari kerja merasa kebingungan

pada saat mendaftar karena banyaknya data yang perlu diisi. Tidak ada tools untuk BP3TKI agar dapat memantau perkembangan jumlah pendaftar Jobsinfo setiap bulannya sehingga kami tidak dapat melaporkan perkembangan jumlah pencari kerja yang terdaftar di Jobsinfo secara mandiri.

## 2. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedua Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI

Tabel  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua  
Tahun 2017 dan 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%	72,92%	<b>72,92</b>	100%	115,34%	<b>115,34</b>
Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis system	80%	17,50%	<b>21,88</b>	90%	31,67%	<b>35,19</b>

- **Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan**

Jumlah target penempatan TKI pada tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu sejumlah 33.250 orang. Sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2018 sebesar 38.349 orang atau sebesar 115,34%. Lebihnya capaian target persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan sebesar 100% dikarenakan masyarakat umum khususnya CTKI sudah mengetahui dan memahami kebijakan dan persyaratan untuk dapat melakukan proses pembuatan KTKLN di BP3TKI Bandung sebelum keberangkatan ke negara penempatan.

- **Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis sistem**

Dari jumlah target 100% penempatan TKI yang memenuhi standar, ditargetkan 90% penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis sistem. Sampai tahun 2018 jumlah TKI Formal berjumlah 9.478 orang atau sebesar 31,67% dari jumlah 29.925 orang (90% dari jumlah penempatan 33.250 TKI), sehingga TKI Formal banyak yang merasa tidak perlu membuat E-KTKLN karena sudah tidak ada bukti fisik berupa kartu. Adapun bukti bahwa TKI tersebut sudah membuat E-KTKLN adalah Foto dan Finger Print yang terekam pada sistem E-KTKLN.

### 3. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Ketiga Meningkatnya Pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan Transaksi Non Tunai

Tabel  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketiga  
Tahun 2017 dan 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai	70%	8,45%	<b>12,07</b>	100%	25,20%	<b>25,20</b>

- **Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai**

Kebijakan pemerintah mengenai proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai baru diaplikasikan pada akhir tahun 2015 sehingga target dan pencapaian persentasenya masih kecil. CTKI yang proses pelayanannya sudah menggunakan transaksi secara non-tunai baru bisa di realisasikan melalui PPTKIS di P4TKI Bekasi yang menerapkan transaksi secara non-tunai bekerja sama dengan Bank Pemerintah atau biasa disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, sedangkan CTKI/TKI Mandiri baik di BP3TKI Bandung dan P4TKI lainnya masih diperbolehkan menggunakan transaksi tunai. Dari jumlah target 33.250 orang (100% dari jumlah penempatan 33.250 TKI) yang menggunakan transaksi non-tunai baru tercapai sejumlah 8.378 TKI atau sebesar 25,20%.

### 4. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Keempat Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan TKI Non Prosedural

Tabel  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keempat  
Tahun 2017 dan 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	37 lokasi	35 lokasi	<b>94,59</b>	38 Kab/Kota	40 lokasi	<b>105,26</b>

- **Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN**

Terdapat revisi target jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN dari 23 Kab/Kota menjadi 38 lokasi di Kab/Kota se Jawa Barat dikarenakan pada tahun 2018, BP3TKI Bandung mempunyai 3 Paket Sosialisasi yaitu Sosialisasi P2TKI di Lembaga Pendidikan, Sosialisasi P2TKI di Desa/Kec/Kab dan Sosialisasi P2TKI dengan narasumber setara Menteri. Capaian 40 lokasi sosialisasi dilaksanakan di 18 lokasi kegiatan sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman, 5 lokasi kegiatan sosialisasi P2TKI di SMK/PT/Lembaga Pelatihan/Bursa Kerja, 15 lokasi kegiatan sosialisasi P2TKI di Desa/Kec/Kab/Kota dan 2 lokasi kegiatan Sosialisasi Pencegahan PMI Unprosedural sampai akhir Tahun 2018. Selama menjalankan sosialisasi pada tahun 2018, tidak ada hambatan yang berarti karena terdapat hubungan yang baik antara BNP2TKI, BP3TKI, dan Dinas Tenaga Kerja di Daerah. Realisasi waktu pelaksanaan dan lokasi sosialisasi selalu sesuai dengan perencanaan proses penyelesaian administrasi berlangsung lancar.

**5. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kelima**  
**Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku**

**Tabel**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kelima**  
**Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	90%	37,08%	<b>41,20</b>	95%	55,06%	<b>57,96</b>

- **Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan**

Penurunan target persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan dikarenakan indikator penilaian kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku menggunakan data kasus/pengaduan dari CTKI/TKI/keluarganya yang terdata di Crisis Center BNP2TKI.

Sepanjang tahun 2018, jumlah PPTKIS di wilayah kerja Jawa Barat sebanyak 89 PPTKIS. Sehingga prosentase target di setiap triwulannya tetap yaitu 95% dari jumlah

PPTKIS. Terdapat sebanyak 49 PPTKIS mematuhi standar pelayanan atau 55,06%. Berdasarkan data pengaduan TKI pada tahun 2018 masih ada 40 PPTKIS (44,94%) di Jawa Barat yang pernah terlibat kasus dan mendapat teguran/hukuman dari BNP2TKI. Kasus PPTKIS seringkali dibiarkan berlarut-larut sehingga penyelesaian kasus yang terjadi di PPTKIS cenderung lama. Saat ini tools yang dimiliki baru tools untuk menilai LPK. Belum adanya tools untuk menilai kepatuhan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk melakukan penilaian kepatuhan Lembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung Penempatan secara menyeluruh di BP3TKI Bandung. Saat ini kepatuhan dilihat dari keaktifan dalam berkoordinasi dengan BP3TKI Bandung. Belum sebandingnya antara alokasi anggaran pembinaan dengan jumlah Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan di wilayah kerja Jawa Barat menyebabkan Koordinasi lebih banyak dilakukan melalui surat dan telepon.

#### 6. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Keenam Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses dan diselesaikan

Tabel  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keenam  
Tahun 2017 dan 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	53%	53	100%	276%	276

- **Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI**

BP3TKI Bandung melayani pengaduan secara langsung (tatap muka) maupun yang berupa surat tembusan. Hingga saat ini baik BP3TKI Bandung, P4TKI Cirebon, P4TKI Sukabumi, LTSP Indramayu dan PTSP Karawang selalu menindaklanjuti semua pengaduan yang masuk dan berkoordinasi BNP2TKI (Pusat) maupun dengan Perwakilan RI yang berada di Negara Penempatan. Target jumlah pengaduan tahun 2018 sebesar 400 kasus, sedangkan jumlah realisasi 1.104 kasus atau sebesar 276%. Terdiri dari 1.084 kasus berupa surat masuk dan 20 kasus berupa pengaduan langsung (tatap muka).

## 7. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Ketujuh

### Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, Masa dan Purna TKI

**Tabel**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketujuh**  
**Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	20%	13,25%	<b>66,25</b>	15%	13,25%	<b>88,33</b>
Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	71%	<b>71</b>	100%	71%	<b>71</b>

- **Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI**

Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI terjadi dikarenakan BP3TKI Bandung selalu berupaya menindaklanjuti permasalahan CTKI/TKI dengan memanggil para pihak untuk di mediasi dalam rangka pemenuhan hak TKI. Semakin tertatanya proses penempatan dan perlindungan TKI sehingga permasalahan-permasalahan TKI di Luar Negeri menjadi berkurang.

- **Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum**

BP3TKI Bandung melayani setiap pengaduan langsung yang datang ke BP3TKI Bandung. BP3TKI juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk setiap perkara yang membutuhkan bantuan hukum. Di tahun 2018 ini jumlah pengaduan langsung ke BP3TKI Bandung sebesar 71 kasus atau 71% dari target sebesar 100 kasus.

## 8. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedelapan

### Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan

**Tabel**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedelapan**  
**Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	70%	0%	<b>0</b>	85%	0%	<b>0</b>
Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non procedural	95%	76,76%	<b>80,80</b>	97%	118,90%	<b>112,58</b>

- **Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen**

Capaian persentase system monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen masih 0% dikarenakan BP3TKI Bandung belum memiliki unit intelejen untuk mendukung penyelesaian masalah TKI.

- **Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural**

BP3TKI Bandung hanya akan memberangkatkan CTKI ke Negara Penempatan yang sudah mengikuti prosedur yang sesuai dan berdokumen lengkap sesuai ketentuan berlaku seperti sudah mendapatkan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan diterbitkannya E-KTKLN di BP3TKI Bandung, P4TKI Bekasi, P4TKI Cirebon, P4TKI Sukabumi, LTSP Indramayu dan PTSP Karawang. Selain itu, BP3TKI Bandung juga melakukan sosialisasi untuk menjadi TKI yang legal di kantong-kantong TKI Non Prosedural. Dari jumlah target 32.252 TKI (97% dari jumlah penempatan 33.250 TKI) tercapai 38,349 orang TKI atau sebesar 118,90%.

## 9. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesembilan Meningkatnya kemampuan TKI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro

Tabel  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesembilan  
Tahun 2017 dan 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	750	675	<b>90</b>	900	900	<b>100</b>
Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	50	0	<b>0</b>	50	0	<b>0</b>
Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha	50%	53%	<b>106</b>	50%	47%	<b>94</b>
Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.080	0	<b>0</b>	1.140	0	<b>0</b>
Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	70%	0%	<b>0</b>	85%	0%	<b>0</b>

- **Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha**

Jumlah target pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha tahun 2018 sebanyak 900 orang. Seharusnya target pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha berjumlah 3.000 orang. Adapun revisi jumlah target dikarenakan dalam anggaran untuk kegiatan kewirausahaan hanya dilaksanakan kegiatan yang regular masih belum terdapat anggaran tambahan (APBNP) untuk kegiatan kewirausahaan. Jumlah TKI Purna yang sudah mendapatkan Edukasi Keuangan dan Wirausaha (Pemberdayaan Terintegrasi) sampai Tahun 2018 sebanyak 900 orang yang dilaksanakan di 36 lokasi (paket) dengan rincian 2 paket di Kab. Cirebon, 2 paket di Kab. Indramayu, 2 paket di Kab. Kuningan, 5 paket di Kab. Sukabumi, 2 paket di Kab. Bandung Barat, 6 paket di Kabupaten Majalengka, 5 paket di Kabupaten Karawang, 2 paket di Kabupaten Sumedang, 4 paket di Kabupaten Subang, 4 paket di Kabupaten Garut dan 2 paket di Kabupaten Purwakarta. Jumlah peserta untuk masing-masing paket 25 orang sehingga total 900 orang peserta di periode Tahun 2018.

- **Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan**

Capaian pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan tahun 2018 masih sebesar 0% dikarenakan anggaran tambahan (APBNP) untuk kegiatan pemberdayaan TKI Purna/bermasalah masih belum turun.

- **Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha**

Jumlah persentase TKI Purna yang menjadi wirausaha tahun 2018 sebanyak 375 orang atau 47% dari total target 400 orang. Upaya dari BP3TKI Bandung dalam mengarahkan TKI Purna agar menjadi Wirausaha salah satunya dengan memonitor para peserta setelah mendapatkan program pemberdayaan (pelatihan). Namun pasca kegiatan edukasi, tidak semua peserta bisa menerapkan ilmu yang diperoleh.

- **Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI**

Pada tahun 2018 jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI masih sebesar 0% karena BP3TKI Bandung tidak meluncurkan Kampung TKI dikarenakan adanya penghematan/pemotongan anggaran.

- Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/ Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya**  
 Jumlah persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya masih sebesar 0% karena BP3TKI Bandung belum melakukan fasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya.

#### 10. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesepuluh Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI bermasalah

Tabel  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesepuluh  
Tahun 2017 dan 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	100	100	<b>100</b>	200	117	<b>58,5</b>

- Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal**

BP3TKI Bandung memiliki Pos Pelayanan Pendataan Kepulangan dan Keberangkatan TKI di Debarkasi Embarkasi Bandara Husein Sastranegara Bandung yang selalu melakukan pendataan TKI yang kepulangannya bermasalah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kedutaan/Perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya.

Jumlah target fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal tahun 2018 sebanyak 200 orang. Seharusnya target pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha berjumlah 50 orang. Adapun revisi jumlah target dikarenakan terdapat anggaran tambahan (APBNP) untuk penanganan TKI bermasalah. Jumlah TKIB yang di fasilitasi pelayanan pemulangannya sebanyak 117 atau sebesar 58,5%.

**11. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesebelas**  
**Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelayanan administrasi kerjasama, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan**

**Tabel**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesebelas**  
**Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 bulan	12 bulan	<b>100</b>	12 Bulan	12 bulan	<b>100</b>
Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	B	B	<b>100</b>	A	B	<b>80</b>

- **Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel**

Terlaksananya pelaporan berbasis web secara tertib tercapai 100%, dikarenakan terpenuhinya perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang memadai dan terpenuhinya kerangka laporan yang telah baku, sehingga pelaporan bisa terselesaikan secara tepat waktu. Laporan Kegiatan BP3TKI Bandung masih belum bisa dinilai sudah berbasis akuntabel dikarenakan masih terdapat data yang selisih pada Laporan Tahunan. Hasil perhitungan data bulanan secara manual dari setiap seksi dan P4TKI terkadang berbeda dengan data rekapitulasi pada Laporan Tahunan yang diserahkan kepada Sub Bag Tata Usaha.

- **Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP**

Tercapainya peningkatan penilaian kualitas AKIP dengan nilai B diperoleh karena terdapat dukungan kegiatan pengendalian/pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin diselenggarakan oleh BNP2TKI. Adapun acuan dari pelaksanaan AKIP berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang sudah dirancang selama 5 (lima) tahun ke depan.

**12. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedua belas**  
**Terwujudnya Organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi**

**Tabel**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua belas**  
**Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%	11,11%	<b>11,11</b>	100%	55,56%	<b>55,56</b>

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	10 Lokasi	6 lokasi	<b>60</b>	10 Lokasi	6 lokasi	<b>60</b>
Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%	100%	<b>100</b>	100%	100%	<b>100</b>

- **Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/ LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat**

Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di wilayah kerja BP3TKI Bandung masih belum bisa terlaksana dengan maksimal. Target pelaksanaan LTSP sebanyak 9 lokasi di Provinsi Jawa Barat diantaranya di Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta dan Kab. Subang. Pada saat ini yang sudah diresmikan dan beroperasi sebanyak 5 lokasi yaitu :

No.	LTSP/LTSA	Tanggal Peresmian
1.	Kab. Indramayu	10 Oktober 2016
2.	Kab. Cirebon	06 Desember 2016
3.	Kab. Sukabumi	27 Desember 2017
4.	Kab. Subang	08 Februari 2018
5.	Kab. Karawang	14 Februari 2018

- **Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)**

Target jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM) pada tahun 2018 direvisi menjadi 10 lokasi dikarenakan ada penambahan lokasi pelayanan penempatan dengan dibukanya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) sebanyak 6 lokasi. Hal ini terjadi oleh karena adanya komitmen bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Anti Korupsi.

- **Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI**

Jumlah persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI sebesar 100%, dikarenakan BP3TKI Bandung sudah menerapkan aplikasi tersebut untuk memudahkan petugas rekapitulasi kehadiran dalam mensinkronkan jumlah kehadiran secara manual dengan rekapitulasi kehadiran secara finger print. Selain itu adanya penguatan jaringan komputer dan koordinasi yang baik dengan Biro Kepegawaian BNP2TKI. Dari keseluruhan jumlah pegawai di BP3TKI

Bandung sudah hampir setengah pegawai yang menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.

## **KENDALA**

### **1. Seksi Penyiapan dan Penempatan**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan diberlakukannya sistem Finger Print pada Penerbitan E-KTKLN (tidak ada fisik berupa Kartu) masih banyak TKI/CTKI yang mempertanyakan bukti bahwa E-KTKLN telah selesai diproses.

### **2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesulitan dalam menangani kasus mencari alamat TKI / memberikan info ke Keluarga TKI tentang permasalahan TKI dikarenakan tidak ada anggaran.
- 2) Pemanggilan PPTKIS untuk mediasi sangat sulit dikarenakan PPTKIS apabila dipanggil jarang yang datang bahkan banyak PPTKIS yang tutup.
- 3) Counter Bandara di Husein Sastranegara sudah tidak ada sehingga mengakibatkan pendataan keberangkatan dan kepulangan TKI tidak maksimal.
- 4) Edukasi kewirausahaan harus melibatkan mantan TKI Korea yang agak sulit untuk mendapatkannya dan kebanyakan sudah memiliki usaha sendiri.

### **3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya data dan informasi mengenai lowongan pekerjaan di sektor formal untuk tujuan Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya untuk diinformasikan kepada pencari kerja.
- 2) Masyarakat pencari kerja banyak yang belum mengetahui terkait adanya website *jobsinfo* (*jobsinfo.bnp2tki.go.id*) dan cara menggunakannya.

#### **4. Sub Bagian Tata Usaha**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Masih belum terdapat mesin Finger Print untuk Petugas Honorer sehingga absensi masih secara manual.
- 2) Masuknya Laporan dari setiap Seksi dan Satuan Kerja daerah masih sering terlambat.

### **TINDAK LANJUT**

#### **1. Seksi Penyiapan dan Penempatan**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas memberikan penjelasan kembali mengenai kebijakan tentang perubahan KTKLN menjadi E-KTKLN.

#### **2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Disnakertrans / P4TKI / LTSP walaupun info yang didapat agak terlambat.
- 2) Membuat surat ke Kedutaan walaupun jarang ada balasan.
- 3) Sudah menemui pihak-pihak yang berkepentingan dan juga untuk sementara Petugas Pendataan menunggu di depan pintu keluar.
- 4) Mencari informasi ke para mantan TKI Korea untuk mendapatkan data TKI Korea yang belum memiliki usaha sendiri.

#### **3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan BNP2TKI (Direktorat Kerjasama Luar Negeri dan Direktorat Promosi) mengenai lowongan kerja yang tersedia di wilayah Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya;
- 2) Menjelaskan prosedur mendaftar melalui website [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id) kepada pencari kerja.

#### **4. Sub Bagian Tata Usaha**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Konsultasi dan koordinasi dengan BNP2TKI untuk mengatasi permasalahan absensi untuk Petugas Honorar.
- 2) Koordinasi dengan setiap seksi-seksi untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan.

## BAB I - PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategik, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja BP3TKI Bandung pada tahun 2018. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan BP3TKI Bandung dan seluruh jajaran BNP2TKI dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

### B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BP3TKI Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### 1. Tugas Pokok

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung diberikan tugas pokok yaitu "*Memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah*

*Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Instansi baik Pemerintah Pusat maupun Daerah di wilayah Propinsi Jawa Barat”.*

## 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, Pengembangan Program dan Anggaran;
2. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Penyelenggaraan Pemasarakatan Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Pelayanan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
5. Pengumpulan data, Pembinaan Layanan Informasi serta Pembinaan Sistem dan Jaringan Informasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Pemberdayaan dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Pelaksanaan Pemantauan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Negara Penempatan;
8. Pelaksanaan Pendaftaran dan Seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia Penempatan oleh Pemerintah;
9. Monitoring Penyediaan dan Pelaksanaan Sertifikasi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
10. Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Promosi;
11. Pelaksanaan Fasilitas Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja Indonesia;
12. Fasilitas Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
13. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
14. Penyusunan kelompok jabatan pengantar kerja;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

### C. ASPEK STRATEGIS

Berkaitan dengan pencapaian target RPJM Tahun 2015-2019, ditetapkan pokok-pokok **strategi BP3TKI Bandung** yang difokuskan pada :

1. Unit Pelayanan Publik yang sudah memenuhi standar pelayanan;
2. Pemanfaatan jobs info BNP2TKI dalam alur proses penempatan TKI;
3. Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI;
4. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan melalui Crisis Center;
5. Fasilitasi Pelayanan Perlindungan TKI melalui Mediasi dan Advokasi;
6. Pemberdayaan TKI Purna dan Keluarganya.

### D. PERMASALAHAN UTAMA (*ISSUE STRATEGIS*)

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius antara dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia antara lain:

1. Hasil Pemetaan Potensi CTKI yang dilakukan oleh BP3TKI Bandung masih merupakan data mentah dan belum spesifik mengarah pada Peta CTKI.
2. Belum adanya potret daerah yang dapat digunakan dalam pembuatan model penyuluhan/sosialisasi.
3. Perlunya Bimbingan Teknis Petugas Penyuluh dalam rangka Peningkatan SDM.
4. Pemanfaatan Jobs Info masih belum sempurna, karena Petugas Jobs Info tidak dapat mengetahui berapa orang Jawa Barat yang telah mengakses ke Jobs Info.
5. Koneksi Jaringan (internet) yang tidak stabil mempengaruhi akses ke SISKOTKLN.
6. Realisasi Penempatan berbeda dengan realisasi PAP, karena TKI Cuti dan Re-Entry tidak mengikuti PAP sedangkan itu menjadi angka realisasi penempatan.
7. Permasalahan kasus terhadap TKI yang habis kontrak namun masih dipertahankan oleh majikan sedangkan keluarga dan TKI tersebut ingin pulang. BP3TKI Bandung sudah berkirin surat ke Kementerian Luar Negeri namun surat tersebut tidak ditanggapi.
8. Edukasi Pemberdayaan Kewirausahaan tidak ada anggaran monitoring walaupun lewat telepon tetapi tidak maksimal.
9. Tidak adanya anggaran untuk Identifikasi peserta Edukasi Pemberdayaan Kewirausahaan sehingga peserta yang diinginkan sesuai PERKA Badan tidak bisa dipenuhi.
10. Perlunya Bimbingan Teknis Evaluator Akuntabilitas Kinerja.

## **E. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disebut LAKIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil-hasil yang telah dicapai dan sebagai bentuk pertanggung-jawaban program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun agar diketahui oleh pimpinan dan masyarakat serta sebagai dasar dalam menentukan langkah yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dan hasil-hasilnya dari pelaksanaan program dan kegiatan BP3TKI Bandung yang tertib, teratur dan efisien untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

## **F. RUANG LINGKUP**

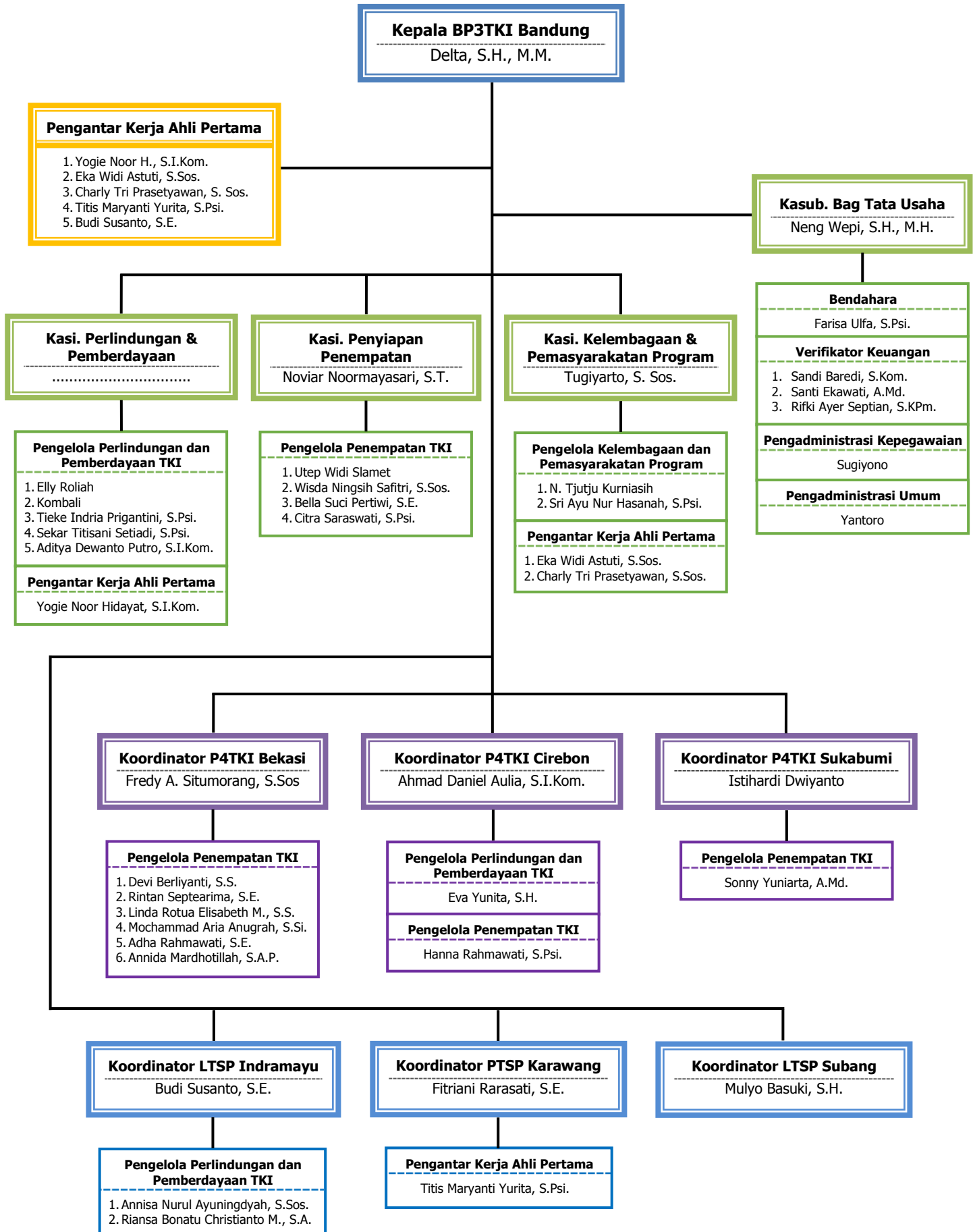
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun oleh BP3TKI Bandung mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan khususnya tugas dan fungsi dalam lingkup pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Barat.

## **G. PERSONALIA DAN ORGANISASI**

### **1. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BP3TKI Bandung memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI BP3TKI BANDUNG



## 2. Jumlah Pegawai

BP3TKI Bandung pada tahun 2018 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seperti pada tabel tersebut :

**Tabel 1.**  
**Jumlah Pegawai BP3TKI Bandung Tahun 2018**

No	Bagian/Seksi	Jenis Kelamin			Pangkat/ Gol				Jab		Struktural		Status Kepegawaian	
		L	P	JML	I	II	III	IV	S	NS	ES.III	ES.IV	PNS	CPNS
1	Kepala BP3TKI	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-
2	Sub. Bagian Tata Usaha	4	3	7	2	-	5	-	1	6	-	1	6	1
3	Seksi Penyiapan Penempatan	1	4	5	-	-	5	-	1	4	-	1	3	2
4	Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan	3	3	6	-	-	6	-	-	6	-	-	4	2
5	Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Prog.	2	3	5	-	-	6	-	1	4	-	1	4	1
6	P4TKI Bekasi	2	5	7	-	-	7	-	-	7	-	-	4	3
7	P4TKI Cirebon	1	1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1
8	LTSA Cirebon	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
9	P4TKI Sukabumi	2	-	2	-	1	1	-	-	2	-	-	2	-
10	LTSP Indramayu	2	1	3	-	-	3	-	-	3	-	-	1	2
11	PTSP Karawang	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
12	LTSP Subang	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>12</b>

## H. DASAR PELAKSANAAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3TKI Bandung Tahun 2018 didasarkan pada Rencana Strategis BP3TKI Bandung Tahun 2015-2019 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu:

1. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI);
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015;
  7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden R.I. Nomor 165 Tahun 2015 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara R.I. Tahun 2015 Nomor 339);
  9. Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  11. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI;
  12. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01/KA/-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10/KA/IV/2012 tanggal 20 April 2012;
  14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 - 2019;

16. Keputusan Kepala BP3TKI Bandung Nomor KEP.21/BP3TKI-6/I/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis BP3TKI Bandung Tahun 2015 - 2019;
17. Keputusan Kepala BP3TKI Bandung Nomor KEP.22/BP3TKI-6/I/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BP3TKI Bandung Tahun 2015 - 2019;
18. Keputusan Kepala BP3TKI Bandung Nomor KEP.11/BP3TKI-6/I/2018 Tentang Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018.

## I. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3TKI Bandung Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, aspek strategis, permasalahan utama (*issue* strategis), maksud dan tujuan, ruang lingkup, organisasi dan personalia, dasar pelaksanaan dan sistematika penyajian.

### **Bab II – Perencanaan Kinerja,**

- A. Menjelaskan Rencana Strategis BP3TKI Bandung yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja, Target Kinerja tahun 2018, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan;
- B. Menjelaskan Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018**, menjelaskan pengelolaan kinerja berupa

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BP3TKI Bandung berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis BP3TKI Bandung 2015 – 2019, Program dan Kegiatan dan Perjanjian Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung tahun 2018.

### A. RENCANA STRATEGIS BP3TKI BANDUNG 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) BP3TKI Bandung 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah BP3TKI Bandung yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BP3TKI Bandung beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra BP3TKI Bandung telah mengacu pada RPJMN tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Perekonomian. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah BP3TKI Bandung maupun stakeholder eksternal. Secara ringkas substansi BP3TKI Bandung dapat diilustrasikan sebagai berikut :

#### 1. Visi

Visi BP3TKI Bandung yang diharapkan memberi arah ke masa depan yaitu :

**Terwujudnya Tenaga Kerja Indonesia yang Berkualitas dan Bermartabat di wilayah Provinsi Jawa Barat**

#### 2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, BP3TKI Bandung menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- 0 **Zero TKI Informal**, Seluruh TKI yang dikirimkan ke LN berstatus tercatat sebagai TKI dan dipekerjakan pada sektor formal. Target juga mencakup beralihnya seluruh TKI ilegal yang dipersiapkan kembali menjadi TKI legal pada sektor formal;
- 1 **Pra Keberangkatan TKI rata-rata 1 Bulan**, Tersedianya layanan yang cepat dan mudah sejak pengurusan administrasi, pembekalan TKI, persiapan keberangkatan hingga keberangkatan TKI menuju negara penempatan;
- 2 **Dua bulan gaji biaya maksimal TKI**, Meminimalkan biaya persiapan dan pemberangkatan yang menjadi beban TKI sehingga menjadi sebesar-besarnya 2 bulan gaji TKI bersangkutan;
- 3 **Remitansi TKI Meningkat 3 kali lipat**, Meningkatkan nilai pengiriman uang TKI dari negara penempatan menjadi 3 x lipat dari nilai saat ini sebesar Rp. 70 Triliun/Tahun;
- 4 **Perlindungan utuh di 4 (empat) Tahapan**, TKI mendapatkan jaminan dan akses perlindungan sejak di tahap pra-keberangkatan, masa bekerja, kepulangan hingga tahap pemberdayaan;
- 5 **TKI Purna jalani 5 solusi mandiri**, TKI yang kembali ke tanah air mendapatkan beragam fasilitas dan layanan berupa (i) pelatihan, (ii) dukungan finansial, dan (iii) pendampingan usaha, untuk menjadikannya sebagai wirausaha mandiri serta (iv) pelatihan dan (v) lapangan pekerjaan bagi yang akan bekerja di perusahaan.

### 3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BP3TKI Bandung menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu

**Tabel 2**  
**Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BP3TKI Bandung**

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum
	Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha
Terwujudnya Tata Kelola Manajemen BP3TKI yang Baik	Persentase laporan rutin yang berbasis web secara tepat waktu
	Nilai AKIP BP3TKI
	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang mudah, murah dan cepat
	Jumlah unit yang ditetapkan sebagai WBK dan WBBM

#### 4. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan atas tujuan tersebut, selanjutnya BP3TKI Bandung akan menjabarkan dalam sasaran-sasaran program/kegiatan (Sasaran Strategis) yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Program/Kegiatan dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja BP3TKI Bandung**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera</b>	
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI
	Persentase CTKI mendaftar pada Job info
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan
	Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural
Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha
	Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal
<b>Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Manajemen BP3TKI yang Baik</b>	
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan.	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat
	Jumlah Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)
	Persentase terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI

## 5. Target Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Rencana Strategis BP3TKI Bandung Tahun 2015-2019, target jangka menengah sampai dengan tahun 2018 untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Target Kinerja BP3TKI Bandung**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	156.317
	Persentase CTKI mendaftar pada Job info	80 %
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100 %
	Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem	90 %
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	100 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	23 Kab/kota
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	95 %
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100 %
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	15 %
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100 %
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	85 %
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	97 % TKI
Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	3.000
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan	50
	Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha	38 %
	Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.140
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	85 %
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	50
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan.	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi	Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100 %
	Jumlah Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi
	Persentase terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100 %

## 6. Arah Kebijakan dan Strategi

Penyusunan Rencana Strategis sejauh mungkin telah diupayakan dapat mengakomodasikan kebutuhan *stakeholders*, baik internal BP3TKI maupun instansi lain atau masyarakat umum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Arah kebijakan yang akan dilakukan BP3TKI Bandung dalam mendukung terciptanya *clean government dan good governance* sebagaimana matrik berikut ini :

**Tabel 5**  
**Arah Kebijakan Dan Strategi BP3TKI Bandung Tahun 2015-2019**

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Meningkatkan kerjasama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dalam rangka pemetaan potensi CTKI	Melakukan kerjasama dengan dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan dalam rangka peta potensi CTKI
Meningkatkan pemanfaatan jobsinfo sebagai tools terpercaya dalam pendaftaran CTKI dan pengguna/employer dalam proses penempatan	Tersedianya aplikasi jobsinfo online yang menjadi central database lowongan pekerjaan TKI dan terhubung dengan seluruh PPTKIS dan lembaga pendidikan dan pelatihan
Meningkatkan tata kelola rekrutmen dan verifikasi dokumen CTKI berbasis SISKOTKLN	Penguatan pelaksanaan registrasi pendaftaran CTKI secara online di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/Kota dan Pelayanan Prima dalam Penerbitan KTKLN, Verifikasi Dokumen TKI dan memberikan Pembekalan Akhir Pemberangkatan sesuai SOP.
Menginformasikan seluruh standar pelayanan menyangkut pra keberangkatan secara online dalam website dan atau media lainnya	Mempublikasikan standar pelayanan pra keberangkatan dalam website dan atau media lainnya
Reformasi bisnis model proses penempatan dan cost structure dalam pelayanan penempatan TKI	Menyederhanakan bisnis model proses penempatan TKI Menekan biaya yang dikeluarkan TKI
Mewujudkan transaksi dalam proses pelayanan TKI sejak pra keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Mewujudkan transaksi non tunai terintegrasi secara online sistem untuk semua laporan
Peningkatan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat / lembaga secara luas	Melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan masyarakat / lembaga secara luas
Peningkatan pembinaan dan monitoring lembaga penempatan dan pendukung penempatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan dan pembina sanksi dan rating lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan yang diumumkan ke publik secara periodik</li> <li>Sistem monitoring dan evaluasi kualitas infrastruktur dan kinerja PPTKIS</li> </ol>
Fasilitasi pengaduan yang mudah diakses / terjangkau oleh TKI, responsif dan solutif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya crisis center yang mampu melayani pengaduan secara online</li> <li>Falilitasi pengaduan yang diproses berbasis sistem integrasi dengan Kementerian atau lembaga Perwakilan RI</li> </ol>

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan advokasi dan mediasi terhadap TKI	1. Fasilitasi advokasi dan mediasi CTKI/TKI dan TKI Purna bermasalah 2. Membantu penyelesaian kasus TKI bermasalah di luar negeri bekerjasama dengan Kemlu 3. Tersedianya sistem monitoring pelaksanaan layanan perlindungan hukum 4. Tersedianya fasilitas penyediaan lawyer untuk TKI bermasalah hukum
Penguatan fungsi intelegen dalam pengawasan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan	Penguatan fungsi intelegen dalam pengawasan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan
Melakukan langkah-langkah preentif atau pencegahan dan peningkatan penempatan TKI Non Prosedural	Melakukan langkah-langkah preentif atau pencegahan dan peningkatan penempatan TKI Non Prosedural
Meningkatnya pemberdayaan TKI Purna dan Keluarga	Melaksanakan pemberdayaan CTKI/TKI dan keluarganya demi terwujudnya kesejahteraan
Meningkatkan pemberdayaan WNIO/TKIB/TKI Purna yang tidak berdokumen	Tersedianya strategi pemulangan WNIO/TKIB/TKI Purna yang tidak berdokumen hingga pemberdayaan yang berintegrasi
Menyediakan layanan pendamping usaha dan akses permodalan	Tersedianya kerjasama dengan lembaga keuangan dan donor dalam rangka menunjang pelaksanaan pembekalan dan penyediaan bantuan modal 1. TKI Purna berwirausaha yang berhasil 2. TKI purna yang tidak dapat berwirausaha dapat disalurkan pada lapangan kerja di dalam negeri
TKI Purna menjadi wirausaha	Tersedianya kerjasama dengan perusahaan (asing dan lokal) untuk menerima alokasi TKI Purna secara rutin
Meningkatkan pemberdayaan TKI Purna menjadi komunitas kampung TKI	TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas TKI/ Kampung TKI
Penguatan penanganan dan pemulangan serta pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	Tersedianya krisis managemen protokol menyangkut penyelamatan dan pengembalian TKI yang terintegrasi dengan pemberdayaan di dalam negeri
Penguatan penanganan TKI bermasalah	Melakukan kerjasama dengan dinas sosial dan kepolisian dalam rangka penanganan TKI bermasalah ke daerah asal
Penyiapan perencanaan yang kreatif, inovatif, rasional dan menjawab personal	Peningkatan kualitas Rencana Program dan Anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (felt need), dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response) 1. Penyusunan LAKIP yang berkualitas 2. Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB
Menyediakan layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/P4TKI yang didukung penuh dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Kesepakatan prinsip dengan Kepala daerah terkait menyangkut integrasi layanan TKI dalam LTSP daerah berbasis SISKOTKLN

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Perluasan agenda reformasi birokrasi menuju capaian RB yang terbaik	Meningkatnya kasitas birokrasi melalui: 1. Penyusunan grand design 2. Penerapan SPIP 3. Akuntabilitas keuangan 4. Penerapan e-government 5. Manajemen arsip 6. Penerapan Sakip berbasis IT 7. Penyusunan lakip yang berkualitas
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui : 1. Penyusunan standar pelayanan 2. Penyusunan SOP Pelayanan 3. Pendirian LTSP 4. Unit pengaduan masyarakat berbasis IT 5. Sistem Pelayanan berbasis IT
Terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	Meningkatnya pemahaman pegawai tentang aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK)

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

BP3TKI Bandung melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan BNP2TKI secara keseluruhan yaitu Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BP3TKI Bandung adalah sebagai berikut :

### a. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program.

Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program, bertanggung jawab pada Sasaran Program/kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 6**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja**  
**Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program Tahun 2018**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	156.317
	Persentase CTKI mendaftar pada job info	80 %
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	23 Kab/kota
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	95 %
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 1.621.580.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</b>		

## b. Seksi Penyiapan Penempatan

Seksi Penyiapan Penempatan, bertanggungjawab pada Sasaran Program/ kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 7**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja**  
**Seksi Penyiapan dan Penempatan Tahun 2018**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100 %
	Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis sistem	90 %
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	100 %
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 2.989.549.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</b>		

## c. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan, bertanggungjawab pada Sasaran Program/kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 8**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja**  
**Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Tahun 2018**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100 %
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna TKI	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/ TKI	15 %
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100 %
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	85 %
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	97 % TKI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	3.000
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	50
	Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha	38 %
	Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.140
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re integrasi usaha di desa asalnya	85 %
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	50
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 5.048.055.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</b>		

#### d. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha, bertanggungjawab pada Sasaran Program/ kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 9**  
**Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja**  
**Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2018**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Pelayanan Administrasi Kerjasama, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat fungsi	Prosentase Layanan terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100 %
	Jumlah Pembangunan Zona Intgritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi
	Persentase terintegritasnya aplikasi system informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100 %
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 9.988.859.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</b>		

### C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE:/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja Pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujudnya nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

BP3TKI Bandung telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra BP3TKI Bandung tahun 2015 – 2019. Penetapan Kinerja tingkat BP3TKI Bandung Tahun 2018 dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

#### 1. Rencana Kinerja Tahunan BP3TKI Bandung Renstra Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP3TKI Bandung tahun 2018 masih mengacu pada Renstra BP3TKI Bandung sebagaimana Keputusan Kepala BP3TKI Bandung Nomor.KEP.21/BP3TKI-6/I/2016, sebagai berikut:

**Tabel10**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**BP3TKI Bandung Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	156.317
	Persentase CTKI mendaftar pada Job info	80 %
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100 %
	Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem	90 %
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	100 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	23 Kab/kota
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	95 %
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100 %
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	15 %
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100 %
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	85 %
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	97 % TKI
Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	3.000
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan	50
	Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha	38 %
	Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.140
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	85 %
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	50
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan.	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi	Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100 %
	Jumlah Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi
	Persentase terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100 %
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 19.648.043.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI</b>		

## 2. Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018

Untuk melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan BP3TKI Bandung Tahun 2018, telah dibuat Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018 sesuai Peraturan BP3TKI Bandung Nomor : KEP.11/BP3TKI-6/I/2018 tentang Perjanjian Penetapan Kinerja Kepala BP3TKI Bandung Tahun 2018. Adapun Penetapan Kinerja Kepala BP3TKI Bandung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel11**  
**Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	156.317
	Persentase CTKI mendaftar pada Job info	80 %
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100 %
	Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem	90 %
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	100 %
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	23 Kab/kota
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	95 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100 %
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	15 %
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100 %
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	85 %
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	97 % TKI
Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	3.000
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan	50
	Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha	38 %
	Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.140
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	85 %
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal	50
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan.	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi	Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100 %
	Jumlah Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	4 Lokasi
	Persentase terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100 %
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 19.648.043.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI</b>		

Karena adanya pencermatan, reconfusing dan penghematan Tahun 2018, maka terjadi perubahan target pada Penetapan Kinerja tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 12**  
**Reviu Target Penetapan Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Tersedianya Peta Potensi CTKI	<i>Jumlah Potensi CTKI</i>	5.400
	<i>Persentase CTKI mendaftar pada Job info</i>	30%
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%
	Persentase Penempatan TKI Formal yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural yang Berbasis Sistem	90%
Meningkatnya pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai	100%
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan TKI Non Prosedural	<i>Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN</i>	38 Kab/Kota
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	95%
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses, dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan crisis senter berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, masa dan purna	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	15%
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	85%
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	97%
Meningkatnya kemampuan TKI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	<i>Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha</i>	900
	Jumlah pekerja Ilegal/undocumented yang di fasilitasi pulang dan mendapat pemberdayaan	50
	<i>Persentase TKI Purna yang Menjadi Wirausaha</i>	50%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	Jumlah TKI purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.140
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	85%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI Bermasalah	<i>Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/ Bermasalah di debarkasi ke daerah asal</i>	200
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan.	Terlaksananya Pelaporan Berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 Bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	A
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi	Prosentase Layanan Terpadu Satu Pintu(LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%
	<i>Jumlah Pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)</i>	10 Lokasi
	Persentase terintegrasinya aplikasi system Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3TKI BANDUNG Rp. 19.648.043.000,-</b>		
<b>Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI</b>		

## BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGELOLAAN KINERJA

#### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Perencanaan strategis dan pengukuran kinerja serta Analisis capaian kinerja merupakan rangkaian system akuntabilitas kinerja yang penting. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BP3TKI Bandung.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada BP3TKI Bandung menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Kategori Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018**

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1.	Sangat Baik	> 100	Biru
2.	Baik	80 – 100	Hijau
3.	Cukup	50 – 79	Kuning
4.	Kurang	< 49	Merah

Proses penghitungan kinerja menggunakan Informasi Indikator Kinerja (IIK) yang telah ditetapkan sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

#### 2. Pengukuran Capaian Kinerja

Penilaian kinerja pada BP3TKI Bandung dilakukan selama 1 tahun. Secara rinci hasil penilaian kinerja BP3TKI Bandung sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 14**  
**Pengukuran Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018**  
**(Per Triwulan)**

<b>PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018</b>	
Kementerian/Lembaga	: BNP2TKI
Unit Kerja	: BP3TKI Bandung
Pagu Anggaran	: Rp. 19.648.043.000,-, Realisasi Anggaran Tahun 2018 : Rp. 18.723.303.895,- atau 95,29%
Program	: Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	<b>5.400</b>	1.350	1.656	1.350	1.437	1.350	899	1.350	1.951
	Persentase CTKI mendaftar pada Jobs Info	<b>30%</b>	7,5%	5,6%	7,5%	5,6%	7,5%	2%	7,5%	2%
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	<b>100%</b>	25%	26,37%	25%	25,46%	25%	28,70%	25%	28,18%
	Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis system	<b>90%</b>	22,5%	5,88%	22,5%	7,61%	22,5%	8,52%	22,5%	7,55%
Meningkatnya Pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan Transaksi Non Tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai	<b>100%</b>	25%	2,63%	25%	9,52%	25%	7,44%	25%	4,11%
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	<b>38 Kab/ Kota</b>	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	13 Kab/Kota	9 Kab/Kota	6 Kab/Kota	9 Kab/Kota	12 Kab/Kota
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	<b>95%</b>	95%	85,39%	95%	87,64%	95%	94%	95%	92,13%
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	<b>100%</b>	25%	51%	25%	68%	25%	84%	25%	77,25%

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, Masa dan Purna TKI	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	<b>15%</b>	3,75%	12,75%	3,75%	17%	3,75%	5,12%	3,75%	0,15%
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	<b>100%</b>	25%	17%	25%	6%	25%	8%	25%	3%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	<b>85%</b>	21,25%	0%	21,25%	0%	21,25%	0%	21,25%	0%
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non procedural	<b>97%</b>	24,25%	27,18%	24,25%	26,25%	24,25%	29,59%	24,25%	29,05%
Meningkatnya kemampuan TKI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	<b>900</b>	75	75	225	300	300	300	300	225
	Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	<b>50</b>	12	0	12	0	13	0	13	12%
	Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha	<b>50%</b>	12,5%	38,8%	12,5%	38,8%	12,5%	38,8%	12,5%	0
	Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	<b>1.140</b>	285	0	285	0	285	0	285	0
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	<b>85%</b>	21,25%	0%	21,25%	0%	21,25%	0%	21,25%	0%
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	<b>200</b>	50	34	50	22	50	31	50	28
Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelayanan administrasi kerjasama, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	<b>12 Bulan</b>	3 Bulan	3 Bulan	3 bulan	3 Bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	<b>A</b>	B	B	B	B	B	B	B	B
Terwujudnya Organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	<b>100%</b>	25%	55,56%	25%	55,56%	25%	55,56%	25%	55,56%
	Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	<b>10 Lokasi</b>	10 Lokasi	6 Lokasi	10 Lokasi	6 Lokasi	2 Lokasi	6 Lokasi	1 Lokasi	6 Lokasi
	Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel 15**  
**Pengukuran Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018**

<b>PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018</b>	
Kementerian/Lembaga	: BNP2TKI
Unit Kerja	: BP3TKI Bandung
Pagu Anggaran	: Rp. 19.648.043.000,-, Realisasi Anggaran Tahun 2018 : Rp. 18.723.303.895,- atau 95,29%
Program	: Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	<b>5.400</b>	5.943	110,06	37.300.000	36.850.000	98,79
	Persentase CTKI mendaftar pada Jobs Info	<b>30%</b>	10%	33,33			
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	<b>100%</b>	115,34%	115,34	2.989.549.000	2.826.697.592	94,46
	Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis system	<b>90%</b>	31,67%	35,19			
Meningkatnya Pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan Transaksi Non Tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai	<b>100%</b>	25,20%	25,20			
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	<b>38 Kab/Kota</b>	40 Kab/Kota	105,26	1.483.415.000	1.384.619.862	93,34
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	<b>95%</b>	55,06%	57,96	61.0000.000	59.888.500	98,18
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	<b>100%</b>	276%	276	438.400.000	389.863.400	88,93

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, Masa dan Purna TKI	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	<b>15%</b>	13,25%	88,33	52.600.000	50.806.800	96,59
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	<b>100%</b>	71%	71			
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	<b>85%</b>	0%	0			
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non procedural	<b>97%</b>	118,90%	112,58			
Meningkatnya kemampuan TKI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	<b>900</b>	900	100	4.485.320.000	4.141.167.360	92,33
	Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	<b>50</b>	0	0			
	Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha	<b>50%</b>	47%	94			
	Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	<b>1.140</b>	0	0			
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	<b>85%</b>	0	0			
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	<b>200</b>	117	58,5	71.735.000	63.827.700	88,98
Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelayanan administrasi kerjasama, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	<b>12 Bulan</b>	12 Bulan	100	1.325.927.000	1.258.851.318	94,94
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	<b>A</b>	B	80			
Terwujudnya Organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	<b>100%</b>	55,56%	55,56	8.662.932.000	8.497.388.786	98,09
	Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	<b>10 Lokasi</b>	6 Lokasi	60			
	Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	<b>100%</b>	100%	100			

## B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam pelaksanaannya Evaluasi Capaian Kinerja pada BP3TKI Bandung menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja. Secara rinci hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran BP3TKI Bandung Tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 16**  
**Hasil Evaluasi Capaian Kinerja BP3TKI Bandung Tahun 2018**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	%
Tersedianya Peta Potensi CTKI	Jumlah Potensi CTKI	<b>5.400</b>	5.943	<b>110,06</b>
	Persentase CTKI mendaftar pada Jobs Info	<b>30%</b>	10%	<b>33,33</b>
Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI	Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	<b>100%</b>	115,34%	<b>115,34</b>
	Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis sistem	<b>90%</b>	31,67%	<b>35,19</b>
Meningkatnya Pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan Transaksi Non Tunai	Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai	<b>100%</b>	25,20%	<b>25,20</b>
Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan TKI Non Prosedural	Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	<b>38 Kab/Kota</b>	40 Kab/Kota	<b>105,26</b>
Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku	Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	<b>95%</b>	55,06%	<b>57,96</b>
Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses dan diselesaikan	Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	<b>100%</b>	276%	<b>276</b>
Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, Masa dan Purna TKI	Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	<b>15%</b>	13,25%	<b>88,33</b>
	Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	<b>100%</b>	71%	<b>71</b>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	%
Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan	Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	<b>85%</b>	0%	<b>0</b>
	Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural	<b>97%</b>	118,90%	<b>112,58</b>
Meningkatnya kemampuan TKI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro	Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	<b>900</b>	900	<b>100</b>
	Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	<b>50</b>	0	<b>0</b>
	Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha	<b>50%</b>	47%	<b>94</b>
	Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas	<b>1.140</b>	0	<b>0</b>
	Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/ Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	<b>85%</b>	0	<b>0</b>
Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI bermasalah	Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	<b>200</b>	117	<b>58,5</b>
Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelayanan administrasi kerjasama, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan	Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	<b>12 Bulan</b>	12 Bulan	<b>100</b>
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	<b>A</b>	B	<b>80</b>
Terwujudnya Organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi	Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	<b>100%</b>	55,56%	<b>55,56</b>
	Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	<b>10 Lokasi</b>	6 Lokasi	<b>60</b>
	Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	<b>100%</b>	100%	<b>100</b>

### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Untuk melakukan Analisis Capaian Kinerja pada BP3TKI Bandung dilakukan membandingkan target sasaran strategis dengan realisasinya akan didapat persentasi naik atau turun. Adapun Analisis Capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesatu Tersedianya Peta Potensi CTKI

**Tabel 17**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesatu**  
**Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah Potensi CTKI	5.400	5.261	<b>97,43</b>	5.400	5.943	<b>110,06</b>
Persentase CTKI mendaftar pada Job Info	30%	10%	<b>33,33</b>	30%	10%	<b>33,33</b>

- **Jumlah Potensi CTKI**

Jumlah target potensi CTKI dari Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 Kab/Kota sebanyak seluruh peserta sosialisasi sebanyak 5.400 orang. Seharusnya target potensi CTKI tahun 2018 berjumlah 156.317 orang, namun terdapat revisi dengan jumlah target menjadi 5.400 orang. Dari laporan 27 Kab/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang diperoleh dari lembaga pendidikan (SMK Kejuruan, Akademi Kebidanan, Poltekkes), Lembaga Pelatihan dan Balai Latihan Kerja, peminat kerja ke Luar Negeri, pencaker yang datang ke BP3TKI Bandung serta Alumni Sekolah Keperawatan yang berminat bekerja sebagai perawat di Kuwait diperoleh data potensi CTKI Tahun 2018 sebanyak 5.943 orang CTKI atau 110,06%.

- **Persentase CTKI mendaftar pada Job Info**

Jumlah target persentase CTKI mendaftar pada Job Info sebesar 30%, namun realisasinya tidak tercapai dikarenakan CTKI tertarik hanya ke Negara Penempatan tertentu dan hanya tertarik pada job tertentu, sedangkan kedua alasan tersebut belum bisa difasilitasi oleh website BNP2TKI. Sehingga realisasi persentase CTKI mendaftar pada Job Info tahun 2018 sebesar 10%. Proses sign up Jobsinfo tidak bisa langsung terdaftar karena ada proses verifikasi oleh pusat. Pencari kerja merasa kebingungan pada saat mendaftar karena banyaknya data yang perlu diisi. Tidak ada tools untuk BP3TKI agar dapat memantau perkembangan jumlah pendaftar Jobsinfo setiap bulannya sehingga kami tidak dapat melaporkan perkembangan jumlah pencari kerja yang terdaftar di Jobsinfo secara mandiri.

## 2. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedua

### Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis sistem P2TKI

**Tabel 18**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua**  
**Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan	100%	72,92%	<b>72,92</b>	100%	115,34%	<b>115,34</b>
Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis system	80%	17,50%	<b>21,88</b>	90%	31,67%	<b>35,19</b>

- **Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan**

Jumlah target penempatan TKI pada tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu sejumlah 33.250 orang. Sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2018 sebesar 38.349 orang atau sebesar 115,34%. Lebihnya capaian target persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan sebesar 100% dikarenakan masyarakat umum khususnya CTKI sudah mengetahui dan memahami kebijakan dan persyaratan untuk dapat melakukan proses pembuatan KTKLN di BP3TKI Bandung sebelum keberangkatan ke negara penempatan.

- **Persentase Penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis sistem**

Dari jumlah target 100% penempatan TKI yang memenuhi standar, ditargetkan 90% penempatan TKI Formal yang memenuhi syarat kerja dan prosedural yang berbasis sistem. Sampai tahun 2018 jumlah TKI Formal berjumlah 9.478 orang atau sebesar 31,67% dari jumlah 29.925 orang (90% dari jumlah penempatan 33.250 TKI), sehingga TKI Formal banyak yang merasa tidak perlu membuat E-KTKLN karena sudah tidak ada bukti fisik berupa kartu. Adapun bukti bahwa TKI tersebut sudah membuat E-KTKLN adalah Foto dan Finger Print yang terekam pada sistem E-KTKLN.

### 3. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Ketiga Meningkatnya Pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan Transaksi Non Tunai

Tabel 19  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketiga  
Tahun 2017 dan 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai	70%	8,45%	<b>12,07</b>	100%	25,20%	<b>25,20</b>

- **Persentase proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai**

Kebijakan pemerintah mengenai proses pelayanan TKI sejak Pra-Keberangkatan sampai dengan Kepulangan menggunakan transaksi secara non-tunai baru diaplikasikan pada akhir tahun 2015 sehingga target dan pencapaian persentasenya masih kecil. CTKI yang proses pelayanannya sudah menggunakan transaksi secara non-tunai baru bisa di realisasikan melalui PPTKIS di P4TKI Bekasi yang menerapkan transaksi secara non-tunai bekerja sama dengan Bank Pemerintah atau biasa disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, sedangkan CTKI/TKI Mandiri baik di BP3TKI Bandung dan P4TKI lainnya masih diperbolehkan menggunakan transaksi tunai. Dari jumlah target 33.250 orang (100% dari jumlah penempatan 33.250 TKI) yang menggunakan transaksi non-tunai baru tercapai sejumlah 8.378 TKI atau sebesar 25,20%.

### 4. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Keempat Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan pencegahan TKI Non Prosedural

Tabel 20  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keempat  
Tahun 2017 dan 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN	37 lokasi	35 lokasi	<b>94,59</b>	38 Kab/Kota	40 lokasi	<b>105,26</b>

- **Jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN**

Terdapat revisi target jumlah lokasi sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKLN dari 23 Kab/Kota menjadi 38 lokasi di Kab/Kota se Jawa Barat dikarenakan pada tahun 2018, BP3TKI Bandung mempunyai 3 Paket Sosialisasi yaitu Sosialisasi P2TKI di Lembaga Pendidikan, Sosialisasi P2TKI di Desa/Kec/Kab dan Sosialisasi P2TKI dengan narasumber setara Menteri. Capaian 40 lokasi sosialisasi dilaksanakan di 18 lokasi kegiatan sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman, 5 lokasi kegiatan sosialisasi P2TKI di SMK/PT/Lembaga Pelatihan/Bursa Kerja, 15 lokasi kegiatan sosialisasi P2TKI di Desa/Kec/Kab/Kota dan 2 lokasi kegiatan Sosialisasi Pencegahan PMI Unprosedural sampai akhir Tahun 2018. Selama menjalankan sosialisasi pada tahun 2018, tidak ada hambatan yang berarti karena terdapat hubungan yang baik antara BNP2TKI, BP3TKI, dan Dinas Tenaga Kerja di Daerah. Realisasi waktu pelaksanaan dan lokasi sosialisasi selalu sesuai dengan perencanaan proses penyelesaian administrasi berlangsung lancar.

**5. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kelima**  
**Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku**

**Tabel 21**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kelima**  
**Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan	90%	37,08%	<b>41,20</b>	95%	55,06%	<b>57,96</b>

- **Persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan**

Penurunan target persentase lembaga penempatan dan pendukung penempatan yang mematuhi standar pelayanan dikarenakan indikator penilaian kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku menggunakan data kasus/pengaduan dari CTKI/TKI/keluarganya yang terdata di Crisis Center BNP2TKI.

Sepanjang tahun 2018, jumlah PPTKIS di wilayah kerja Jawa Barat sebanyak 89 PPTKIS. Sehingga prosentase target di setiap triwulannya tetap yaitu 95% dari jumlah PPTKIS. Terdapat sebanyak 49 PPTKIS mematuhi standar pelayanan atau 55,06%.

Berdasarkan data pengaduan TKI pada tahun 2018 masih ada 40 PPTKIS (44,94%) di Jawa Barat yang pernah terlibat kasus dan mendapat teguran/hukuman dari BNP2TKI. Kasus PPTKIS seringkali dibiarkan berlarut-larut sehingga penyelesaian kasus yang terjadi di PPTKIS cenderung lama. Saat ini tools yang dimiliki baru tools untuk menilai LPK. Belum adanya tools untuk menilai kepatuhan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk melakukan penilaian kepatuhan Lembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung Penempatan secara menyeluruh di BP3TKI Bandung. Saat ini kepatuhan dilihat dari keaktifan dalam berkoordinasi dengan BP3TKI Bandung. Belum sebandingnya antara alokasi anggaran pembinaan dengan jumlah Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan di wilayah kerja Jawa Barat menyebabkan Koordinasi lebih banyak dilakukan melalui surat dan telepon.

#### 6. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Keenam Pengaduan masalah TKI dilayani, diproses dan diselesaikan

Tabel 22  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Keenam  
Tahun 2017 dan 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI	100%	53%	53	100%	276%	276

- **Persentase pengaduan yang diproses di layanan Crisis Center berbasis sistem yang terintegrasi dengan K/L terkait/Perwakilan RI**

BP3TKI Bandung melayani pengaduan secara langsung (tatap muka) maupun yang berupa surat tembusan. Hingga saat ini baik BP3TKI Bandung, P4TKI Cirebon, P4TKI Sukabumi, LTSP Indramayu dan PTSP Karawang selalu menindaklanjuti semua pengaduan yang masuk dan berkoordinasi BNP2TKI (Pusat) maupun dengan Perwakilan RI yang berada di Negara Penempatan. Target jumlah pengaduan tahun 2018 sebesar 400 kasus, sedangkan jumlah realisasi 1.104 kasus atau sebesar 276%. Terdiri dari 1.084 kasus berupa surat masuk dan 20 kasus berupa pengaduan langsung (tatap muka).

## 7. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Ketujuh

### Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak TKI sejak Pra, Masa dan Purna TKI

**Tabel 23**  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Ketujuh  
Tahun 2017 dan 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI	20%	13,25%	<b>66,25</b>	15%	13,25%	<b>88,33</b>
Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum	100%	71%	<b>71</b>	100%	71%	<b>71</b>

- **Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI**

Persentase menurunnya permasalahan CTKI/TKI terjadi dikarenakan BP3TKI Bandung selalu berupaya menindaklanjuti permasalahan CTKI/TKI dengan memanggil para pihak untuk di mediasi dalam rangka pemenuhan hak TKI. Semakin tertatanya proses penempatan dan perlindungan TKI sehingga permasalahan-permasalahan TKI di Luar Negeri menjadi berkurang.

- **Persentase CTKI/TKI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum**

BP3TKI Bandung melayani setiap pengaduan langsung yang datang ke BP3TKI Bandung. BP3TKI juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk setiap perkara yang membutuhkan bantuan hukum. Di tahun 2018 ini jumlah pengaduan langsung ke BP3TKI Bandung sebesar 71 kasus atau 71% dari target sebesar 100 kasus.

## 8. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedelapan

### Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan

**Tabel 24**  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedelapan  
Tahun 2017 dan 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen	70%	0%	<b>0</b>	85%	0%	<b>0</b>
Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non procedural	95%	76,76%	<b>80,80</b>	97%	118,90%	<b>112,58</b>

- **Persentase sistem monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen**

Capaian persentase system monitoring perlindungan berbasis informasi unit intelejen masih 0% dikarenakan BP3TKI Bandung belum memiliki unit intelejen untuk mendukung penyelesaian masalah TKI.

- **Persentase meningkatnya TKI yang berangkat secara prosedural di kantong TKI non prosedural**

BP3TKI Bandung hanya akan memberangkatkan CTKI ke Negara Penempatan yang sudah mengikuti prosedur yang sesuai dan berdokumen lengkap sesuai ketentuan berlaku seperti sudah mendapatkan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan diterbitkannya E-KTKLN di BP3TKI Bandung, P4TKI Bekasi, P4TKI Cirebon, P4TKI Sukabumi, LTSP Indramayu dan PTSP Karawang. Selain itu, BP3TKI Bandung juga melakukan sosialisasi untuk menjadi TKI yang legal di kantong-kantong TKI Non Prosedural. Dari jumlah target 32.252 TKI (97% dari jumlah penempatan 33.250 TKI) tercapai 38,349 orang TKI atau sebesar 118,90%.

## 9. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesembilan Meningkatnya kemampuan TKI Purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro

**Tabel 25**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesembilan**  
**Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			TAHUN 2017		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha	750	675	<b>90</b>	900	900	<b>100</b>
Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan	50	0	<b>0</b>	50	0	<b>0</b>
Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha	50%	53%	<b>106</b>	50%	47%	<b>94</b>
Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI	1.080	0	<b>0</b>	1.140	0	<b>0</b>
Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya	70%	0%	<b>0</b>	85%	0%	<b>0</b>

- **Jumlah pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha**

Jumlah target pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha tahun 2018 sebanyak 900 orang. Seharusnya target pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha berjumlah 3.000 orang. Adapun revisi jumlah target dikarenakan dalam anggaran untuk kegiatan kewirausahaan hanya dilaksanakan kegiatan yang regular masih belum terdapat anggaran tambahan (APBNP) untuk kegiatan kewirausahaan. Jumlah TKI Purna yang sudah mendapatkan Edukasi Keuangan dan Wirausaha (Pemberdayaan Terintegrasi) sampai Tahun 2018 sebanyak 900 orang yang dilaksanakan di 36 lokasi (paket) dengan rincian 2 paket di Kab. Cirebon, 2 paket di Kab. Indramayu, 2 paket di Kab. Kuningan, 5 paket di Kab. Sukabumi, 2 paket di Kab. Bandung Barat, 6 paket di Kabupaten Majalengka, 5 paket di Kabupaten Karawang, 2 paket di Kabupaten Sumedang, 4 paket di Kabupaten Subang, 4 paket di Kabupaten Garut dan 2 paket di Kabupaten Purwakarta. Jumlah peserta untuk masing-masing paket 25 orang sehingga total 900 orang peserta di periode Tahun 2018.

- **Jumlah pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan**

Capaian pekerja ilegal/undocumented yang difasilitasi pemulangan dan mendapat pemberdayaan tahun 2018 masih sebesar 0% dikarenakan anggaran tambahan (APBNP) untuk kegiatan pemberdayaan TKI Purna/bermasalah masih belum turun.

- **Persentase TKI Purna yang menjadi Wirausaha**

Jumlah persentase TKI Purna yang menjadi wirausaha tahun 2018 sebanyak 375 orang atau 47% dari total target 400 orang. Upaya dari BP3TKI Bandung dalam mengarahkan TKI Purna agar menjadi Wirausaha salah satunya dengan memonitor para peserta setelah mendapatkan program pemberdayaan (pelatihan). Namun pasca kegiatan edukasi, tidak semua peserta bisa menerapkan ilmu yang diperoleh.

- **Jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI**

Pada tahun 2018 jumlah TKI Purna yang berwirausaha dalam komunitas Kampung TKI masih sebesar 0% karena BP3TKI Bandung tidak meluncurkan Kampung TKI dikarenakan adanya penghematan/pemotongan anggaran.

- Persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/ Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya**  
 Jumlah persentase terfasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya masih sebesar 0% karena BP3TKI Bandung belum melakukan fasilitasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB/Pekerja migran bermasalah dalam proses re-integrasi usaha di desa asalnya.

## 10. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesepuluh Fasilitasi Pelayanan Penanganan TKI bermasalah

Tabel 26  
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesepuluh Tahun 2017 dan 2018

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal	100	100	<b>100</b>	200	117	<b>58,5</b>

- Fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal**

BP3TKI Bandung memiliki Pos Pelayanan Pendataan Kepulangan dan Keberangkatan TKI di Debarkasi Embarkasi Bandara Husein Sastranegara Bandung yang selalu melakukan pendataan TKI yang keulangannya bermasalah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kedutaan/Perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya.

Jumlah target fasilitasi pelayanan pemulangan TKI Ilegal/bermasalah di Debarkasi ke daerah asal tahun 2018 sebanyak 200 orang. Seharusnya target pekerja migran/purna yang mendapat edukasi pengelolaan keuangan dan wirausaha berjumlah 50 orang. Adapun revisi jumlah target dikarenakan terdapat anggaran tambahan (APBNP) untuk penanganan TKI bermasalah. Jumlah TKIB yang di fasilitasi pelayanan pemulangannya sebanyak 117 atau sebesar 58,5%.

**11. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesebelas**  
**Meningkatnya kualitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelayanan administrasi kerjasama, serta hasil monitoring, evaluasi dan laporan**

**Tabel 27**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesebelas**  
**Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel	12 bulan	12 bulan	<b>100</b>	12 Bulan	12 bulan	<b>100</b>
Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	B	B	<b>100</b>	A	B	<b>80</b>

- **Terlaksananya Pelaporan berbasis Web secara tertib dan akuntabel**

Terlaksananya pelaporan berbasis web secara tertib tercapai 100%, dikarenakan terpenuhinya perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang memadai dan terpenuhinya kerangka laporan yang telah baku, sehingga pelaporan bisa terselesaikan secara tepat waktu. Laporan Kegiatan BP3TKI Bandung masih belum bisa dinilai sudah berbasis akuntabel dikarenakan masih terdapat data yang selisih pada Laporan Tahunan. Hasil perhitungan data bulanan secara manual dari setiap seksi dan P4TKI terkadang berbeda dengan data rekapitulasi pada Laporan Tahunan yang diserahkan kepada Sub Bag Tata Usaha.

- **Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP**

Tercapainya peningkatan penilaian kualitas AKIP dengan nilai B diperoleh karena terdapat dukungan kegiatan pengendalian/pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin diselenggarakan oleh BNP2TKI. Adapun acuan dari pelaksanaan AKIP berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang sudah dirancang selama 5 (lima) tahun ke depan.

**12. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedua belas**  
**Terwujudnya Organisasi, perencanaan dan pengembangan pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat fungsi**

**Tabel 28**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua belas**  
**Tahun 2017 dan 2018**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	100%	11,11%	<b>11,11</b>	100%	55,56%	<b>55,56</b>

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)	10 Lokasi	6 lokasi	<b>60</b>	10 Lokasi	6 lokasi	<b>60</b>
Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI	100%	100%	<b>100</b>	100%	100%	<b>100</b>

- **Persentase Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/ LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat**

Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di wilayah kerja BP3TKI Bandung masih belum bisa terlaksana dengan maksimal. Target pelaksanaan LTSP sebanyak 9 lokasi di Provinsi Jawa Barat diantaranya di Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Bandung, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta dan Kab. Subang. Pada saat ini yang sudah diresmikan dan beroperasi sebanyak 5 lokasi yaitu :

No.	LTSP/LTSA	Tanggal Peresmian
1.	Kab. Indramayu	10 Oktober 2016
2.	Kab. Cirebon	06 Desember 2016
3.	Kab. Sukabumi	27 Desember 2017
4.	Kab. Subang	08 Februari 2018
5.	Kab. Karawang	14 Februari 2018

- **Jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM)**

Target jumlah pembangunan Zona Integritas (WBK dan WBBM) pada tahun 2018 direvisi menjadi 10 lokasi dikarenakan ada penambahan lokasi pelayanan penempatan dengan dibukanya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) sebanyak 6 lokasi. Hal ini terjadi oleh karena adanya komitmen bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Anti Korupsi.

- **Persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI**

Jumlah persentase terintegritasnya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan BP3TKI sebesar 100%, dikarenakan BP3TKI Bandung sudah menerapkan aplikasi tersebut untuk memudahkan petugas rekapitulasi kehadiran dalam mensinkronkan jumlah kehadiran secara manual dengan rekapitulasi kehadiran secara finger print. Selain itu adanya penguatan jaringan komputer dan koordinasi yang baik dengan Biro Kepegawaian BNP2TKI. Dari keseluruhan jumlah pegawai di BP3TKI

Bandung sudah hampir setengah pegawai yang menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BP3TKI Bandung ditunjang dengan anggaran yang berasal dari DIPA tahun 2018 sebesar Rp.19.648.043.000,- dengan realisasi sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 18.726.303.895,- atau 95,29%. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2017 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.596.989.905,- (92,98%) maka terjadi kenaikan sebesar 2,31%.

Secara keseluruhan kegiatan penyerapan anggaran pada BP3TKI Bandung tahun 2018 relatif tinggi dengan penyerapan sebesar 95,29%. Adapun penyerapan yang paling tinggi terdapat pada kegiatan Gaji dan Tunjangan dengan persentase 99,45% dikarenakan pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada PNS dan PPNPN sudah sesuai dengan anggaran yang terdapat dalam POK. Sedangkan penyerapan yang paling rendah terdapat pada kegiatan anggaran Gedung dan Bangunan dengan persentase 0% dikarenakan anggaran tidak dapat dipergunakan.

**Tabel 29**  
**Realisasi Keuangan BP3TKI Bandung Tahun 2018**

<b>REALISASI KEUANGAN TAHUN 2018</b>	
<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	: <b>BNP2TKI</b>
<b>UNIT KERJA</b>	: <b>BP3TKI BANDUNG</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	: <b>2018</b>

<b>KEGIATAN/KOMPONEN</b>	<b>PAGU DIPA</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA</b>
<b>Peta Potensi TKLN Berbasis Permintaan :</b>				
1. Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan TKI	1.483.415.000	1.384.619.862	93,34	98.795.138
2. Job Fair/Pameran/Publikasi dan Promosi	15.145.000	13.747.000	90,77	1.398.000
3. Pemetaan Potensi CTKI/TKI	37.300.000	36.850.000	98,79	450.000
4. Pelaksanaan Online System/Jobinfo	24.720.000	23.786.000	96,22	934.000
5. Pembinaan terhadap Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan	61.000.000	59.888.500	98,18	1.111.500
<b>CTKI/TKI yang Memenuhi Syarat Kerja dan Prosedural :</b>				
1. Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	1.833.840.000	1.728.485.000	94,25	105.355.000
2. Administrasi PAP dan Layanan E-KTKLN	43.144.000	35.785.314	82,94	7.358.686
3. Pelayanan LTSP/Poros Sentra Perbatasan	863.745.000	820.338.178	94,97	43.406.822
4. Pelatihan Pra Pemberangkatan Penempatan G To G	248.820.000	242.089.100	97,29	6.730.900
<b>CTKI/TKI yang Terlindungi :</b>				
1. Penanganan TKI Bermasalah	438.400.000	389.863.400	88,93	48.536.600
2. Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna	4.485.320.000	4.141.167.360	92,33	344.152.640
3. Pelayanan Mediasi dan Advokasi Perlindungan CTKI/TKI	52.600.000	50.806.800	96,59	1.793.200
4. Operasional Pos Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi	71.735.000	63.827.700	88,98	7.907.300
<b>Layanan Internal :</b>				
1. Pembinaan Layanan Publik	102.763.000	82.243.780	80,03	20.519.220
2. Operasional P4TKI	359.819.000	333.103.817	92,58	26.715.183
3. Penyusunan Laporan Keuangan dan LAKIP	2.365.000	1.698.100	71,80	666.900
4. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	504.430.000	492.718.821	97,68	11.711.179
5. Peralatan dan Mesin	355.550.000	349.086.800	98,18	6.463.200
6. Gedung dan Bangunan	1.000.000	0	0,00	1.000.000
<b>Layanan Perkantoran :</b>				
1. Gaji dan Tunjangan	4.364.692.000	4.340.707.997	99,45	23.984.003
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.298.240.000	4.156.680.789	96,71	141.559.211

**Tabel 30**  
**Realisasi Keuangan BP3TKI Bandung berdasarkan Belanja Tahun 2018**

<b>REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN TAHUN 2018</b>					
<b>PER BELANJA</b>					
<b>KODE</b>	<b>MATA ANGGARAN</b>	<b>PAGU DIPA</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA</b>
<b>51</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.364.692.000</b>	<b>4.340.707.997</b>	<b>99,45</b>	<b>23.984.003</b>
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.376.490.000	2.368.794.193	99,68	7.695.807
5122	Belanja Lembur	90.650.000	90.538.000	99,88	112.000
5124	Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	1.897.552.000	1.881.375.804	99,15	16.176.196
<b>52</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>14.926.801.000</b>	<b>14.057.699.521</b>	<b>94,18</b>	<b>869.101.479</b>
5211	Belanja Barang Operasional	3.106.560.000	2.960.414.285	95,30	145.145.715
5212	Belanja Barang Non Operasional	2.817.896.000	2.478.732.140	87,96	339.163.860
5218	Belanja Barang Persediaan	448.148.000	423.101.256	94,41	25.046.744
5221	Belanja Jasa	3.420.875.000	3.353.837.891	98,04	67.037.109
5231	Belanja Pemeliharaan	401.745.000	369.991.369	92,10	31.753.631
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.731.577.000	4.471.622.580	94,51	259.954.420
<b>53</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>356.550.000</b>	<b>349.086.800</b>	<b>97,91</b>	<b>7.463.200</b>
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	355.550.000	349.086.800	98,18	6.463.200
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000	0	0	1.000.000

**Tabel 31**  
**Realisasi Keuangan BP3TKI Bandung Per Jenis Belanja Tahun 2018**

<b>REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN TAHUN 2018</b>				
<b>PER JENIS BELANJA</b>				
<b>MATA ANGGARAN</b>	<b>PAGU DIPA</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA</b>
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	19.648.043.000	18.747.494.318	95,42	900.548.682
A. Belanja Pegawai	4.364.692.000	4.340.707.997	99,45	23.984.003
B. Belanja Barang/Jasa	14.926.801.000	14.057.699.521	94,18	869.101.479
C. Belanja Modal	356.550.000	349.086.800	97,91	7.463.200

## **E. KENDALA**

### **1. Seksi Penyiapan dan Penempatan**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan diberlakukannya sistem Finger Print pada Penerbitan E-KTKLN (tidak ada fisik berupa Kartu) masih banyak TKI/CTKI yang mempertanyakan bukti bahwa E-KTKLN telah selesai diproses.

### **2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesulitan dalam menangani kasus mencari alamat TKI / memberikan info ke Keluarga TKI tentang permasalahan TKI dikarenakan tidak ada anggaran.
- 2) Pemanggilan PPTKIS untuk mediasi sangat sulit dikarenakan PPTKIS apabila dipanggil jarang yang datang bahkan banyak PPTKIS yang tutup.
- 3) Counter Bandara di Husein Sastranegara sudah tidak ada sehingga mengakibatkan pendataan keberangkatan dan kepulangan TKI tidak maksimal.
- 4) Edukasi kewirausahaan harus melibatkan mantan TKI Korea yang agak sulit untuk mendapatkannya dan kebanyakan sudah memiliki usaha sendiri.

### **3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya data dan informasi mengenai lowongan pekerjaan di sektor formal untuk tujuan Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya untuk diinformasikan kepada pencari kerja.
- 2) Masyarakat pencari kerja banyak yang belum mengetahui terkait adanya website *jobsinfo* (*jobsinfo.bnp2tki.go.id*) dan cara menggunakannya.

### **4. Sub Bagian Tata Usaha**

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Masih belum terdapat mesin Finger Print untuk Petugas Honorer sehingga absensi masih secara manual.
- 2) Masuknya Laporan dari setiap Seksi dan Satuan Kerja daerah masih sering terlambat.

## **F. TINDAK LANJUT**

### **1. Seksi Penyiapan dan Penempatan**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas memberikan penjelasan kembali mengenai kebijakan tentang perubahan KTKLN menjadi E-KTKLN.

### **2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Disnakertrans / P4TKI / LTSP walaupun info yang didapat agak terlambat.
- 2) Membuat surat ke Kedutaan walaupun jarang ada balasan.
- 3) Sudah menemui pihak-pihak yang berkepentingan dan juga untuk sementara Petugas Pendataan menunggu di depan pintu keluar.
- 4) Mencari informasi ke para mantan TKI Korea untuk mendapatkan data TKI Korea yang belum memiliki usaha sendiri.

### **3. Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan BNP2TKI (Direktorat Kerjasama Luar Negeri dan Direktorat Promosi) mengenai lowongan kerja yang tersedia di wilayah Amerika, Eropa, Australia dan berbagai negara lainnya;
- 2) Menjelaskan prosedur mendaftar melalui website [jobsinfo.bnp2tki.go.id](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id) kepada pencari kerja.

### **4. Sub Bagian Tata Usaha**

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Konsultasi dan koordinasi dengan BNP2TKI untuk mengatasi permasalahan absensi untuk Petugas Honorer.
- 2) Koordinasi dengan setiap seksi-seksi untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan.

## BAB IV – PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi semua pihak terutama masyarakat Propinsi Jawa Barat dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, Program Kerja, Penetapan Kinerja antara Kepala BNP2TKI dengan Kepala BP3TKI maupun Rencana Strategis (Renstra) BP3TKI Bandung Tahun 2015-2019;
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung (BP3TKI) Bandung Tahun 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung pada tahun anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Pelayanan Teknis di BP3TKI Bandung secara umum sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya Persentase TKI yang ditempatkan memiliki sertifikasi dan atau memenuhi standar yang ditetapkan dibandingkan tahun 2017 yang realisasinya melebihi target atau sebesar 115,34% dikarenakan masyarakat umum khususnya CTKI sudah mengetahui dan memahami kebijakan dan persyaratan untuk dapat melakukan proses pembuatan KTKLN di BP3TKI Bandung sebelum keberangkatan ke negara penempatan.
  - b. Menurunnya Jumlah Pemberdayaan TKI yang semula melibatkan 3.000 peserta berkurang menjadi 900 peserta dikarenakan kegiatan dan penambahan

- anggaran (APBNP) belum bisa dilaksanakan sehingga kegiatan Pemberdayaan TKI hanya bisa dilakukan di 36 lokasi dengan masing-masing peserta berjumlah 25 orang per lokasi.
- c. Menurunnya jumlah target dan capaian peta potensi TKI di Jawa Barat karena kurangnya informasi lowongan pekerjaan yang menarik minat CTKI.
  - d. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dengan terintegrasinya Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK).

## **B. SARAN**

1. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi;
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bandung (BP3TKI) Bandung akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pusat dan daerah.

**Bandung, 23 Januari 2019**

**Kepala,**

**Delta, S.H., M.M.**  
**NIP. 19611224 198912 1 001**